

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada mulanya upaya pembangunan Negara Sedang Berkembang (NSB) diidentikkan dengan upaya meningkatkan pendapatan per kapita atau yang sering disebut dengan strategi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya peningkatan pada pendapatan per kapita diharapkan masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang dihadapi NSB dapat terpecahkan.

Indikator berhasil tidaknya pembangunan semata-mata dilihat dari meningkatnya pendapatan nasional per kapita riil dalam arti tingkat pertumbuhan pendapatan nasional dalam harga konstan harus lebih tinggi dibanding tingkat pertumbuhan penduduk. Kecenderungan ini terlihat dari kemunculan pemikiran awal mengenai pembangunan seperti *The Theory of Economic Growth* oleh Arthur Lewis yang memunculkan teori pertumbuhan yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan ekonomi di negara manapun.

Pada akhir 1960-an, banyak NSB menyadari bahwa 'pertumbuhan' tidak identik dengan 'pembangunan'. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi setidaknya melampaui negara-negara maju pada tahap awal pembangunan mereka memang dapat dicapai, tetapi di pedesaan akan dibarengi dengan masalah seperti pengangguran, kemiskinan di pedesaan, distribusi pendapatan yang timpang dan ketidakseimbangan struktural. Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan

produksi barang dan jasa secara nasional sedangkan pembangunan berdimensi lebih luas dari sekedar peningkatan pertumbuhan ekonomi (Kuncoro, 2010).

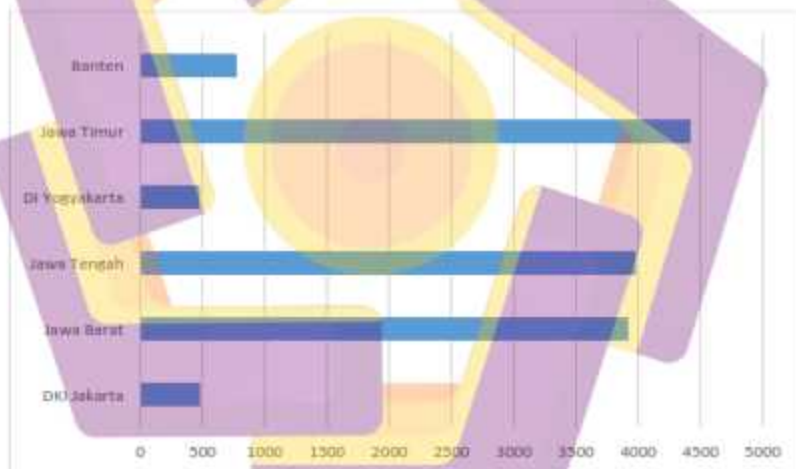
Terjadilah pergeseran arti pembangunan dimana pembangunan ekonomi tidak lagi memuja pendapatan nasional sebagai sasaran pembangunan tetapi lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan sehingga redefinisi pembangunan diwujudkan dalam upaya mengurangi kemiskinan. Upaya pengurangan kemiskinan terus terjadi diseluruh negara di dunia khususnya negara sedang berkembang (Kuncoro, 2010).

Menurut Bank Dunia, ada tiga klasifikasi negara berdasarkan tingkat *Gross National Income* (GNI) per kapita yaitu negara berpenghasilan rendah, menengah dan tinggi. Negara berpenghasilan menengah dibagi menjadi dua yaitu berpenghasilan menengah papan bawah dengan kategori GNI per kapita antara US\$ 976 sampai US\$ 3855 dan berpenghasilan menengah papan atas dengan kategori GNI per kapita antara US\$ 3856 sampai US\$ 11905. Indonesia sendiri berada di klasifikasi negara berpenghasilan menengah papan bawah (*lower middle income economies*) sehingga termasuk negara sedang berkembang yang masih mengalami masalah kemiskinan.

Salah satu masalah utama Indonesia yang belum terselesaikan sampai saat ini yaitu kemiskinan. Hal ini telah menjadi masalah umum pada seluruh daerah di Indonesia. Masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara terpisah dari peningkatan jumlah penduduk, peningkatan pengangguran, serta masalah kesehatan dan pendidikan. Masalah – masalah tersebut menghambat peningkatan tingkat kesejahteraan seseorang atau sekelompok orang yang tergolong miskin.

Untuk membantu mengurangi tingkat kemiskinan, pendekatan harus berada dalam lingkup sektor yang dilakukan oleh pemerintah secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Tingkat kemiskinan di Indonesia diukur dari jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 sebesar 26424,06 ribu jiwa. Wilayah Pulau Jawa merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata paling tinggi dibandingkan wilayah lain karena konsentrasi kegiatan ekonomi ada di Pulau Jawa namun jumlah penduduk miskinnya juga tinggi. Hal ini dibuktikan oleh data jumlah penduduk miskin di Pulau Jawa menurut provinsi pada tahun 2020 sebagai berikut,



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 1 Grafik Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2020 (Ribu Jiwa)

Namun berdasarkan hasil diatas tidak dapat dikatakan bahwa Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat kemiskinan tertinggi karena memang jumlah penduduk mereka lebih banyak, maka harus dilihat berdasarkan proporsi masing-masing

jumlah penduduk provinsi. Dapat dilihat persentase penduduk miskin sebagai berikut,



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Gambar 1. 2 Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi Tahun 2020

Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa persentase penduduk miskin paling tinggi diantara wilayah Pulau Jawa adalah Provinsi D.I Yogyakarta yaitu sebesar 12,28 % disusul oleh provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41 %.

Pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Salah satunya dengan mengarahkan pembangunan ke daerah – daerah, terutama daerah – daerah dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Pembangunan itu sendiri dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing daerah serta tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka pendek dan jangka panjang. Terdapat syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan yang tetap di berbagai negara, beberapa diantaranya adalah pendapatan asli daerah dan belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah dalam membiayai kegiatannya.

PAD diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang dimiliki di daerah, maka pemerintah daerah dapat melakukan pembangun dan mengembangkan daerahnya sesuai dengan kemampuan daerah tersebut sehingga dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan daerah. Jika pemerintah dapat mengelola PAD dengan benar, maka dapat mengoptimalkan perencanaan pembangunan daerah untuk kepentingan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut BPS (2020) belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi equitas dana lancar yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berbasis kinerja untuk mencapai hasil yang telah direncanakan. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, meliputi urusan wajib, urusan pilihan, dan urusan pada departemen atau bidang tertentu yang ditangani bersama oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota.

Belanja daerah merupakan pengeluaran kas daerah yang di dapatkan dari pendapatan daerah dan digunakan untuk keperluan di daerah tersebut, sehingga

dapat membantu perekonomian dan pembangunan di suatu daerah. Dengan begitu belanja daerah dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk menurunkan kemiskinan di daerah tersebut .

Penelitian ini dilakukan karena terdapat penelitian terdahulu berkaitan dengan kemiskinan. Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai PAD terhadap kemiskinan yang telah dilakukan oleh Fitriyanti dan Handayani (2020) dan Oktaviani (2018). Kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan mereka menyatakan bahwa PAD berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Namun berbeda dengan penelitian Siregar dan Ramadhan (2020), yang menyatakan jika PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang belanja daerah terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Fasholah (2018) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh terhadap kemiskinan. Namun berbeda dengan penelitian Zamzami dan Rahmadi (2021) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kemiskinan.

Berdasarkan penjealan tersebutlah yang melatarbelakangi saya untuk mengangkat tema kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah Terhadap Kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumusan suatu masalah yaitu?

- a. Bagaimanakah pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta ?

- b. Bagaimanakah pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada maka tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
- c. Untuk mengetahui pengaruh belanja daerah terhadap kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoretis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- b. Manfaat Praktis

1. Manfaat dari penelitian ini bagi masyarakat yaitu setelah mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, masyarakat dapat memperluas pengetahuan dan wawasan agar kedepannya mampu mewujudkan masyarakat yang terbebas dari kemiskinan.
2. Manfaat untuk pemerintah yaitu sebagai masukan untuk dapat menyelesaikan masalah kemiskinan di Provinsi D.I Yogyakarta.
3. Manfaat bagi penulis dari diadakannya penelitian ini yaitu untuk memenuhi syarat tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana dan memperdalam pengetahuan.

1.5. Sistematika Bab

Struktur sistematika bab yang digunakan dalam penulisan yaitu :

- | | | |
|---------|-------------------------|--|
| BAB I | Pendahuluan | Bab ini berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika bab. Menjelaskan masalah mengenai judul dan susunan dalam penulisan. |
| BAB II | Tinjauan Pustaka | Pada bab ini penjelasan mengenai landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian. |
| BAB III | Metode Penelitian | Dalam bab ini menjelaskan tentang objek penelitian, jenis dan sumber data, definisi oprasional variabel, teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian. |
| BAB IV | Analisis dan Pembahasan | Bab ini menjelaskan hasil analisis yang sudah didapat dan penjelasan mengenai hasil dalam penelitian yang telah dilakukan. |
| BAB V | Penutup | Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitian, apakah sesuai denngan hipotesis yang telah ditulis. Saran yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian. |